



ALTERNATIF PEMBANGUNAN BERBASIS BUDAYA SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN RANTAI NILAI GLOBAL INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Bonifasius Endo Gauh Perdana¹

Abstrak:

Industri kelapa sawit merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Pembangunan sektor ini telah memberikan keuntungan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sosial para pihak yang terlibat. Akan tetapi, berbagai macam isu masih perlu diselesaikan dengan lebih serius terutama isu lingkungan. Penelitian ini menggunakan kerangka global value chain (GVC) untuk melihat relasi dan interaksi antar aktor dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Dalam perspektif ini, pemerataan keuntungan menjadi fokus utama sehingga tidak terpusat pada segelintir elit. Dengan relasi dan interaksi yang sangat kompleks tersebut, perlu adanya model pembangunan baru industri kelapa sawit yang berbasis budaya khususnya pada saat ekspansi perkebunan dengan menghormati hak-hak adat penduduk setempat.

Kata Kunci : *Kelapa Sawit, Rantai Nilai Global, Pembangunan, Budaya*

Abstract:

The palm oil business is one of the major economic drivers in Indonesia. The growth of this industry has contributed to positive outcomes attributed to the development of society. However, a variety of problems, particularly those related to the environment, must be addressed with greater urgency. The global value chain (GVC) framework is employed in this paper to examine the relationships and interactions between actors in the Indonesian palm oil industry. In this approach, the primary emphasis is on the equal distribution of numerous benefits to ensure it is not concentrated on a few individuals. With these incredibly complex relationships and interactions, there is a critical opportunity for a new culture-based growth paradigm for the oil palm sector, particularly during plantation expansion while adhering to customary practices of indigenous communities.

Keywords: *Palm oil, Global Value Chains, Development, Culture*

¹ *Dosen Ilmu Administrasi Negara
Universitas Tidar, Magelang.
e-mail : endo@untidar.ac.id*

Pendahuluan

Partisipasi dalam sebuah Rantai Nilai Global (Global Value Chains) membuat negara-negara di belahan Selatan yang sedang berkembang seperti Indonesia mampu untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi dunia guna memperbaiki tingkat ekonomi dan sosialnya. Akan tetapi, upaya untuk mendapatkan keuntungan tidak tercipta secara otomatis namun perlu kebijakan, infrastruktur, dan inisiatif dari pemerintah dan para pihak terkait.

Industri kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang mampu mendulang pontesi dari mekanisme ekonomi dunia. Menurut data dari International Trade Center (ITC) yang mengolah database UNComtrade pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit (Kode HS 1511) dengan pangsa pasar dunia sebesar 54,1 persen. Indonesia mengekspor 22,8 juta ton minyak kelapa sawit pada tahun 2017 sedangkan Malaysia berada di posisi kedua dengan total ekspor 9,6 juta ton. Menariknya, meski Malaysia hanya menguasai 28,2 persen pangsa pasar minyak sawit dunia, harga per ton minyak sawit Malaysia lebih mahal. Minyak sawit asal Malaysia dihargai sebesar 978 Dolar Amerika per ton sedangkan harga minyak sawit asal Indonesia adalah 890 Dolar Amerika per ton (International Trade Centre, 2021). Salah satu penyebabnya adalah industri hilir kelapa sawit yang lebih maju di Malaysia karena 20 persen produk turunan biokimia dipasok dari negara jiran tersebut (Tong, 2017).

Dari data-data yang diungkap di atas, terdapat indikasi bahwa nilai tambah industri kelapa sawit di Malaysia lebih besar dibanding Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang rendahnya keuntungan yang didapat oleh Indonesia meski menjadi pemasok terbesar minyak sawit dunia. Jika demikian, perlu ada analisis yang mampu menjelaskan dinamika hubungan antar aktor terhadap hambatan-hambatan dalam meraih keuntungan ekonomi dan sosial di industri kelapa sawit nasional.

Pada awal abad ke 20, tanaman kelapa sawit dibawa ke Indonesia oleh seseorang berkebangsaan Belgia bernama Adrien Hallet untuk ditanam di perkebunan Deli, Sumatera Utara (GAPKI, 2016). Henri Fauconnier teman Adrien Hallet membawa bibit kelapa sawit untuk ditanam di Malaysia setelah ia berkunjung ke perkebunan di Deli. Akan tetapi, industri kelapa sawit Malaysia berkembang sangat pesat sehingga dalam beberapa tahun Malaysia menjadi pemasok terbesar kelapa sawit dunia. Pada awal 1990an, Indonesia mulai pelan-pelan mengambil posisi Malaysia sebagai pemasok kelapa sawit terbesar, tepatnya pada tahun 2007.

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan banyak negara-negara di Asia seperti Indonesia untuk memberika akses yang lebih besar kepada investor asing sesuai dengan masukan dari International Monetary Fund (IMF) (Varkkey, 2015). Krisis keuangan ini pula yang mengakibatkan krisis politik sehingga Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Demi memulihkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah membuka akses bagi Foreign Direct Investment (FDI) untuk membeli perusahaan yang terlilit utang. Gelombang investasi asing yang masuk berasal dari perusahaan Malaysia dan Singapura.

Sektor pertanian juga mendapat banyak investor berkat kebijakan ini. Perusahaan kelapa sawit asal Malaysia adalah investor asing gelombang pertama yang memperluas perkebunannya di Sumatera dan Kalimantan. Faktanya, 10 perusahaan sawit terbesar di Malaysia juga mempunyai perkebunan di luar Malaysia yaitu 86 persen lahan perkebunan mereka berada di Indonesia (Tong, 2017). Hasilnya, pengaruh dan kepentingan perusahaan Malaysia di industri kelapa sawit Indonesia sekitar 25-50 persen (Varkkey, 2015).

Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang mengindikasikan bahwa industri kelapa sawit menjadi roda penggerak ekonomi di kedua negara. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi terhadap PDB dan sektor penting lainnya seperti terciptanya lapangan kerja,

kinerja ekspor dan pembangunan di daerah tertinggal. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2015 yang berjudul Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Perpu tersebut memasukan industri kelapa sawit, karet, rumput laut, dan kertas sebagai industri strategis yang mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi. Lebih lanjut, Perpu No.14 tahun 2015 juga menunjukkan bahwa industri hilir kelapa sawit masih terbatas karena mengandalkan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai produk unggulan kelapa sawit yang diekspor.

Secara teknis, CPO bukan merupakan produk turunan akhir atau produk antara dari kelapa sawit karena pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi CPO masih berada pada tingkatan hulu dalam rantai produksi kelapa sawit. Setelah dipanen, dari perkebunan kelapa sawit, TBS dibawa ke pabrik terdekat untuk diolah menjadi CPO dan minyak kernel sawit mentah (CPKO). Hasil lain yang merupakan residu dari pengolahan yaitu palm kernel cake (PKC) dapat digunakan untuk menjadi komponen bahan baku pembangkit listrik, bahan serat papan, dan pakan ternak. Pada tingkatan menengah, aktivitas utamanya ialah jual beli sehingga CPO, CPKO dan PKC didistribusikan ke pembeli domestik atau internasional. Ketika sampai di pabrik tujuan, CPO, CPKO dan PKC kemudian dimurnikan untuk menjadi processed palm oil (PPO) dan processed palm kernel oil (PPKO). Produk turunan PPO dan PPKO meliputi refined, bleached, deodorised (RBD) palm oil; RBD palm olein; RBD palm stearin; RBD palm kernel oil; RBD palm kernel olein; RBD palm kernel stearin; etc. Palm fatty acid distillates and palm kernel fatty acid distillates diproduksi sebagai produk sampingan dari proses permurnian. Selanjutnya, produk tingkatan menengah dari pengolahan minyak kelapa sawit dapat dikategorikan sesuai peruntukan pada industri hilirnya yaitu minyak makan, specialty fats (digunakan untuk bahan pencampur es krim), biokimia (gliserin, soap noodles), biofuel, produk makanan (margarin, mayones) dan produk kecantikan dan rumah tangga

(gincu, kosmetik, dll.) Terakhir, yang dimaksud dengan produk final dalam rantai produksi adalah barang-barang rumah tangga atau konsumsi yang memiliki merek dagang (Tong, 2017).

Rantai nilai global industri kelapa sawit memiliki karakter yang mirip dengan rantai nilai beberapa komoditas seperti hasil tambang yaitu minyak bumi, bijih besi, dan lain sebagainya. Cirinya adalah aktivitas hilir rantai industri dari komoditas tersebut dilakukan di negara maju sehingga negara berkembang asal dari bahan mentah komoditas hanya mendapat nilai tambah yang rendah. Dalam konteks rantai nilai kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit biasanya berada di negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Colombia yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Terbatasnya aktivitas di sektor hilir dalam sebuah rantai nilai global disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jaringan kebijakan pada tingkat domestic, perusahaan induk dalam rantai tersebut dan jaringan kebijakan dalam tataran global yang mengatur dan mengawasi standar.

Faktor lain yang penting untuk diperhatikan ialah karakteristik rantai nilai kelapa sawit yang oligopolistik yaitu hanya ada beberapa perusahaan besar yang mengontrol pasar. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Sime Darby, Felda, Golden Agri Resources, Asian Agri, Musim Mas, dan Wilmar. Perusahaan-perusahaan ini juga terdaftar dalam bursa efek di Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang terlibat dalam rantai nilai kelapa sawit dari hulu ke hilir (Pacheco, et al., 2017). Pada sektor ini, beberapa perusahaan ini juga mempunyai fasilitas di negara pengimpor minyak kelapa sawit seperti Uni Eropa, Cina dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, Wilmar, Musim Mas, Golden Agri Resources, IOI, dan KLK adalah pemain utama yang mengontrol 87 persen perdagangan minyak kelapa sawit dunia dengan membeli dari pemasok pihak ketiga seperti petani sawit swadaya atau pemilik perkebunan lainnya (Nesadurai, 2017). Dengan cara ini, mereka mampu memenuhi permintaan global yang besar. Konsekuensi yang paling signifikan dari rantai nilai yang oligopolistik adalah konsumen individu (bukan perusahaan

produsen barang) dan pedagang eceran tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk memberikan pengaruh pada rantai nilai khususnya terkait isu standar keberlanjutan.

Kerangka Pemikiran

A. Tata Kelola Rantai Nilai Global

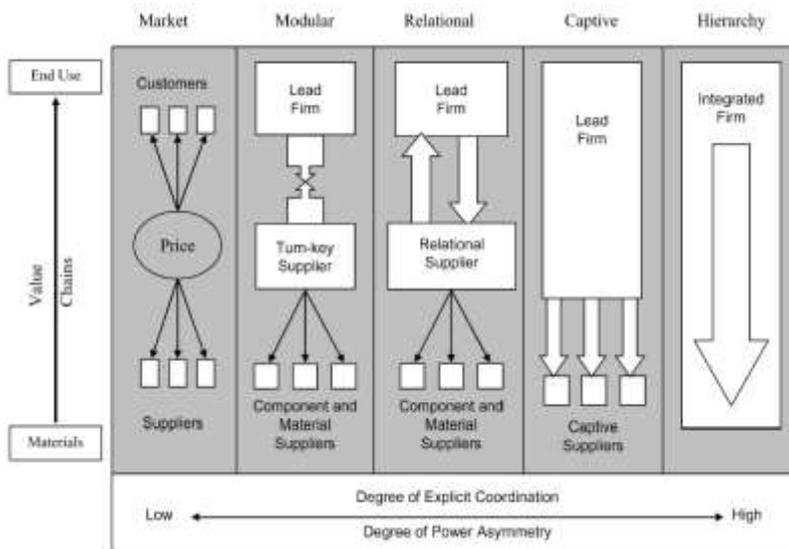
Keterikatan ekonomi dunia sangat tak terelakan pada masa sekarang demi memperluas akses pasar. Akan tetapi, hal ini rentan terhadap relasi kuasa yang asimetris sehingga menyebabkan keuntungan ekonomi hanya terpusat pada segelintir elit. Untuk itu, negara-negara berkembang yang terlibat dalam ekonomi dunia harus mampu untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dengan menarik arus modal melalui investasi asing. Investasi asing tidak secara otomatis mengindikasikan strategi yang transformatif bagi negara terkait untuk meningkatkan posisi mereka dalam sebuah rantai nilai global.

Dalam analisis rantai nilai global, dimensi relasi kuasa pihak-pihak dalam rantai nilai global ditandai dengan para pihak yang memastikan kepentingan ekonomi mereka terjamin tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Rantai nilai global juga memberikan gambaran terhadap tata kelola sebaran kuasa antar pihak terutama kuasa dari perusahaan induk dan konteks institusional yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan dinamika pasar. Struktur kuasa dalam rantai nilai global dapat diamati dengan melihat jenis tata kelola rantai nilainya.

Pada banyak rantai nilai global komoditas, perusahaan induk berperan untuk mengatur dinamika dalam rantai nilai karena mereka memiliki modal usaha yang besar, pengetahuan yang maju terhadap teknologi, dan industri yang mengandalkan kemampuan yang tinggi (Gereffi, 2013). Sektor pertanian yang memiliki karakteristik khusus yaitu rantai nilai bersifat additive (proses produksi tidak bisa dibagi-bagi pada saat yang sama). Hal ini mengakibatkan peran perusahaan induk semakin dominan yang dapat dilihat dari meningkatnya perhatian konsumen pada isu keberlanjutan. Selanjutnya perusahaan-perusahaan

tersebut berupaya menanggapi kekhawatiran konsumen mereka dengan menjamin bahwa rantai nilai global mereka menerapkan prinsip keberlanjutan yang ketat. Unilever, Cadbury, Nestle dan beberapa perusahaan lain adalah contoh perusahaan yang menawarkan asas keterbukaan dengan penelusuran rantai nilai global dari pasokan bahan mentah dari minyak kelapa sawit yang sesuai dengan standar keberlanjutan yang dikeluarkan oleh the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Gambar 1. Jenis Tata Kelola Rantai Nilai Global



Sumber: Gereffi, dkk., 2005

Sekarangnya ada 5 tipe rantai nilai global yang ditemukan oleh Gereffi, Humphrey, dan Sturgeon pada tahun 2005 yang kerap kali digunakan dalam analisis tata kelola rantai nilai global. 5 tipe tata kelola tersebut ialah Markets, Modular, Relational, Captive, dan Hierarchy (Gereffi et al., 2005). Ada kemungkinan bahwa beberapa tipe tata kelola diterapkan secara bersama-sama. Penyuplai kecil berada di rantai nilai global yang bersifat Captive karena mereka bergantung pada pembeli yang lebih besar yaitu perusahaan induk. Hal ini mengindikasikan pengawasan dan kontrol dilaksanakan oleh perusahaan induk yang menyebabkan jika para penyuplai kecil berpindah rantai nilai global mereka

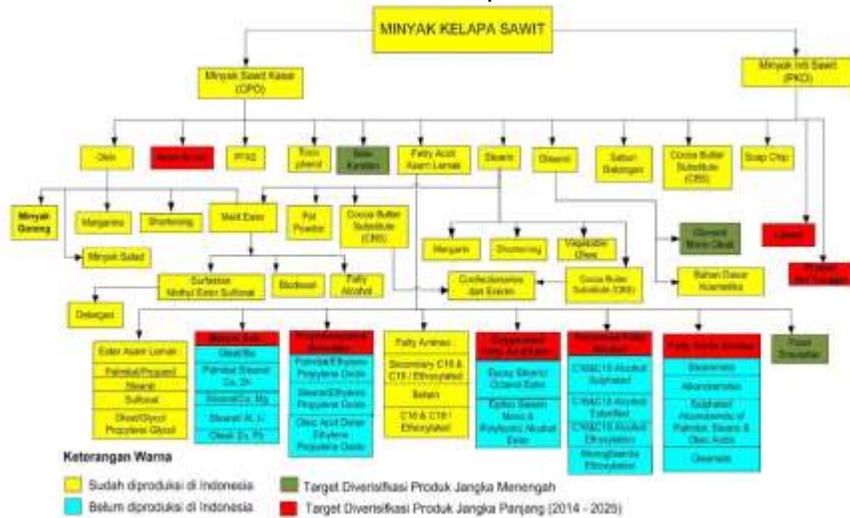
akan mengalami kerugian yang besar. Integrasi vertikal dari perusahaan induk adalah salah satu indikasi dari tata kelola yang bersifat Hierarchy. Proses integrasi dapat dilakukan melalui perusahaan rekanan, penyuplai, atau joint venture yang mempunyai fungsi lebih rendah daripada kantor pusat dari perusahaan induk.

B. Konteks Institusional: Jaringan Kebijakan Domestik

Tujuan utama dari kebijakan pengembangan industri adalah meningkatkan level kompetitif dari suatu negara. Kebijakan industri bisa ditargetkan untuk semua tingkatan aktivitas dalam sebuah rantai nilai global atau hanya target khusus (Tijaja & Faisal, 2014). Umumnya rantai nilai global komoditas mengindikasikan bahwa nilai tambah berada pada sektor hilir dari rantai produksi. Dalam konteks rantai nilai kelapa sawit, berkat kegunaannya yang sangat beragam mulai dari minyak makan, biokimia, biofuel, dan produk turunan lainnya mengakibatkan sektor hilir industri ini sangat menjanjikan.

Perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sementara dimoratorium oleh Peraturan Presiden No.8 tahun 2018. Peraturan tersebut menyatakan bahwa alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang baru dihentikan dan memerintahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mengadakan evaluasi menyeluruh pada industri ini. Banyak pihak yang mengapresiasi langkah pemerintah ini dan mengasosiasikannya atas jawaban untuk menjawab kritik atas konflik-konflik yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Implikasinya pengembangan sektor hulu industri kelapa sawit tidak didukung oleh pemerintah melainkan industri kelapa sawit dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitasnya dalam menerapkan tata kelola berkelanjutan. Peran teknologi juga diperkuat dengan Roadmap of Making Indonesia 4.0 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang memprioritaskan industri makanan dan kimia yaitu bagian dari sektor hilir industri kelapa sawit.

Gambar 2. Pohon Industri Kelapa Sawit Nasional



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2015

Instrumen kebijakan lainnya yang penting terkait industrialisasi ialah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Kebijakan ini mengkategorikan industri kelapa sawit sebagai industri strategis yang “memiliki peran utama sebagai penggerak ekonomi di masa depan.” Potensi sumber daya alam sebagai keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi adalah modal bagi industri kelapa sawit nasional untuk maju. Melalui Kemeterian Perindustrian, pemerintah Indonesua telah menetapkan rencana aksi pada tahun 2015 memprioritaskan industri kelapa sawit. Beberapa sektor hilir sudah dikembangkan namun di beberapa sektor lainnya masih dalam tahap perencanaan dengan mengandeng pihak-pihak terkait terutama sinergi dengan rencana pembangunan perusahaan induk.

C. Kebijakan Standarisasi Global (Isu Keberlanjutan)

Konsumen dan organisasi non pemerintah sangat aktif dalam diskusi dan aksi untuk memberikan kritik pada industri kelapa sawit atas tata kelola produksi yang tidak mengusung prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Di sisi lain, The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah rezim tata kelola yang mengatur standarisasi industri kelapa sawit mencoba menjawab kritik tersebut.

Meski banyak kemajuan telah dicapai namun hal tersebut dipandang belum cukup sebab RSPO bersifat sukarela dan lemah dalam hal pengawasan (Schleifer & Sun, 2018). Banyak pihak yang memandang RSPO belum menjadi acuan umum praktik industri kelapa sawit dunia.

Isu tentang keberlanjutan dalam industri kelapa sawit ini sedikit banyak mempengaruhi dinamika perdagangan khususnya di pasar Eropa. Uni Eropa telah melegislasi paket undang-undang yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai tanaman yang beresiko tinggi sehingga melarang penggunaannya sebagai komponen biofuel mulai tahun 2030 (European Commission, 2018). Pemerintah Indonesia dan Malaysia berencana untuk melakukan retaliasi perdagangan dengan Uni Eropa akibat buntutnya jalur-jalur diplomatik. Berbagai pernyataan balasan juga dikeluarkan seperti argument bahwa konsumen tidak rela membayar lebih mahal untuk membeli minyak kelapa sawit yang tersertifikasi. Hal ini terjadi karena proses sertifikasi membutuhkan biaya tambahan guna membayar audit, logistik dan penilaian lingkungan. Harga minyak kelapa sawit yang tersertifikasi (CSPO) lebih mahal dikisaran 8 hingga 12 dolar Amerika per ton dibandingkan dengan yang tidak tersertifikasi (The Japan Times, 2019).

Perspektif rantai nilai global berargumen bahwa rantai pasok yang beretika dalam diterapkan dengan asas transparansi. Maksudnya adalah rantai nilai kelapa sawit dapat ditelusuri oleh konsumen hingga ke tingkatan pabrik pengolahannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan status sertifikasi pabrik pengolahan dan perkebunan yang ditelusuri. Akan tetapi, beberapa kesulitan timbul karena banyak perusahaan yang memasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mereka dari berbagai perkebunan dan pabrik pengolahan. Di beberapa kasus, terdapat perusahaan yang mencampur pasokan TBS mereka dari perkebunan yang sudah bersertifikat RSPO dan yang tidak bersertifikat (Nesadurai, 2017). Saat dihadapkan pada permintaan pasar yang keta tatas produk bersertifikat seperti di Eropa, perusahaan akan berupaya memenuhinya. Akan tetapi, untuk pasar India dan Cina yang tidak terlalu memusingkan sertifikasi RSPO, perusahaan juga cenderung tidak menerapkan praktik keberlanjutan dalam rantai nilai global mereka

Metode

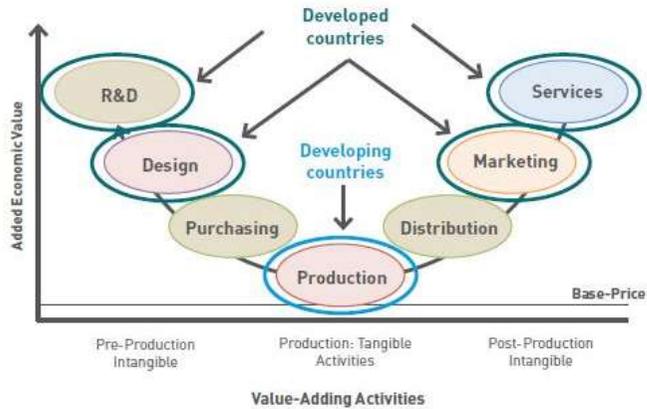
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk proses pengumpulan data. Untuk tujuan ini, data statistik, kajian pustaka dan berita media cetak dan elektronik akan dikumpulkan dan dipelajari melalui metode analisis isi. Data kualitatif akan memperkaya dan melengkapi narasi laporan penelitian yang disusun dengan telaah pustaka.

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi Upgrading bagi Rantai Nilai Global Industri Sawit Indonesia

Identifikasi kondisi yang tepat untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri sawit dunia adalah langkah yang penting demi mendapatkan peningkatan secara ekonomi. Hal yang paling mudah dilakukan dalam rangka mengkonseptualisasikan hal ini adalah peningkatan tingkatan dari sektor yang mengandalkan padat karya ke sektor yang lebih maju dan mengandalkan teknologi. Nilai tambah yang lebih banyak biasanya ditemukan di layanan pra dan pascaproduksi. Dalam perspektif rantai nilai global yang kompleks biasanya hal ini diindikasikan dengan lokasi kantor pusat perusahaan induk yang berada di negara maju sedangkan proses produksinya dilakukan di negara berkembang.

Gambar 3. Smiling Curve yang Menjelaskan Posisi Nilai Tambah Dalam Rantai Nilai Global



Source: Authors based on Baldwin et al., 2014; Shih, no date.

Sumber: Greffi & Fernandez-Stark, 2016

Pada era Export Oriented Industrialisation (EOI) sekarang, banyak negara yang berlomba untuk masuk dalam suatu rantai nilai global dengan cara mengambil spesialisasi di sektor khusus seperti hanya membuat barang jadi atau fokus pada penyediaan layanan untuk pasokan di sektor hulu. Alasan utamanya adalah untuk membangun rantai nilai global dari sektor hulu hingga hilir membutuhkan upaya yang sangat besar termasuk kekuatan koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dan dana segar melalui foreign direct investment (FDI).

Di sisi lain, Gereffi berpendapat bahwa meski berpartisipasi dalam suatu rantai nilai global lebih mudah dengan cara spesialisasi sektor namun risikonya juga cukup besar (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). Dia berargumen bahwa negara-negara yang memiliki perekonomian yang lebih tidak akan bisa memperkuat kemampuan mereka karena biasanya mereka hanya fokus di sektor hulu rantai nilai global seperti perakitan komponen impor untuk pasar internasional. Aspek lainnya yang harus diperhatikan juga ialah institusi, know-how, dan akses pasar yang terbatas atau yang lebih yaitu tertutup. Sebagai contoh, luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia membuat Indonesia dengan mudah menjadi eksportir utama minyak kelapa

sawit di dunia dengan pangsa pasar 54 persen. Akan tetapi, hal ini juga menunjukkan bahwa produk dari sektor hilir industri kelapa sawit belum dikembangkan dengan baik.

Isu produktivitas juga menjadi perhatian karena terdapat kecenderungan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan daripada menanam bibit unggul yang memproduksi minyak sawit lebih banyak. Tata kelola perkebunan juga disorot karena semestinya efisiensi tata kelola mampu meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Sebagai contoh, perkebunan yang dikelola oleh perusahaan kelapa sawit besar mampu menghasilkan 5 ton CPO per hektar per tahun sedangkan perkebunan yang dikelola petani kecil swadaya hanya menghasilkan setengahnya.

Hal yang paling penting bagi industri kelapa sawit Indonesia bukan sebatas hiliriasasi industri melalui process atau product upgrading tetapi intersectoral upgrading. Pasar yang sedang berkembang di negara-negara seperti Cina, India, Pakistan dan beberapa negara di Afrika adalah peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan posisinya dalam rantai nilai global. Hal ini memungkinkan karena pasar-pasar tersebut memiliki karakteristik khusus (contohnya permintaan untuk produk kelapa sawit tertentu) yang bisa menjadi dasar bagi Indonesia untuk menjajaki strategi upgrading yang sesuai. Penetrasi pada pasar nontradisional seperti di beberapa negara Afrika dianggap sebagai rencana yang cukup strategis untuk diterapkan sebagai rencana upgrading. Di Afrika, negara-negara berkembang sedang dalam proses restrukturisasi perekonomian mereka dengan membuka akses pasar kepada investor asing. Indonesia semestinya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan rantai nilai regional.

B. Budaya sebagai Model Alternatif Pembangunan Industri Kelapa Sawit

Peran budaya dalam pembangunan menjadi elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian Plessis dan Rautenbach,

budaya merupakan aspek yang sama pentingnya dengan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Du Plessis & Rautenbach, 2010). Lebih lanjut, penelitian ini juga menegaskan untuk tidak sepenuhnya mengandalkan indikator pembangunan yang bersifat ekonometrik seperti angka kemiskinan dan kesehatan melainkan mementingkan tata kelola berbasis budaya. Hal ini sangat signifikan dalam konteks industri sawit di Indonesia. Banyak lahan baru yang dibuka untuk perkebunan merupakan hutan adat yang didiami oleh suku bangsa tertentu yaitu suku Dayak di daerah Kalimantan. Seringkali konflik agrarian yang terjadi karena hak-hak kepemilikan atas tanah yang akan dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit tidak jelas. Sebagai contoh di provinsi Kalimantan Barat, banyak konflik agraria yang terjadi karena penolakan alih fungsi lahan pertanian, hutan adat dan situs-situs keramat seperti makam (Levang, dkk., 2016).

UNESCO sebagai badan PBB yang mengurus tentang budaya menjabarkan peran budaya sebagai dimensi dalam pembangunan. Kajian tentang peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Wiktor-mach menyitir dokumen UNESCO tentang peran budaya dalam pembangunan yaitu 1) menggunakan budaya sebagai sarana untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi; 2) memastikan hak-hak budaya (adat) bagi semua orang khususnya kaum minoritas dan penduduk asli; 3) menggunakan budaya sebagai sarana pengentasan kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja di sektor budaya dan pariwisata pada kaum muda, perempuan dan kaum termarginalkan; 4) mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui pelestarian kemampuan dan pengetahuan tradisional; 5) memperkuat daya tahan terhadap bencana dan melawan perubahan iklim dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat lokal; dan 6) kebijakan-kebijakan di perkotaan yang peka terhadap unsur budaya lokal (Wiktor-Mach, 2018).

Pemerintah lokal memiliki peran yang signifikan dalam mengelola pembangunan berbasis budaya. Dalam kajian lain yang dilakukan oleh Vasstrøm dan Normann tentang peran pemerintah lokal dalam pembangunan yang berlandaskan budaya, mereka menekankan bahwa pemerintah lokal seharusnya mempunyai ikatan historis yang kuat dengan daerah yang dipimpinnya (Vasstrøm & Normann, 2019). Di era desentralisasi sekarang, pemerintah daerah punya peran penting dalam menentukan arah pembangunan. Tata kelola industri kelapa sawit juga mempunyai struktur relasi kuasa yang menempatkan pemerintah kabupaten atau kota di level yang strategis dan berpengaruh (Gillespie, 2016). Implikasinya adalah perencanaan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit seharusnya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan menjadikan budaya lokal sebagai haluan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, sayangnya tidak banyak kisah sukses dari model pembangunan industri kelapa sawit semacam ini.

Desa Sibak, Muko-muko selatan di Bengkulu adalah salah satu contoh yang jarang tentang kisah sukses model pembangunan industri sawit yang berbasis budaya. Menurut riset yang dilakukan oleh Purwana, kunci keberhasilan sistem ini di desa Sibak adalah kesuksesan warga setempat memperoleh hak kepemilikan atas lahan mereka (Dewi, 2013). Hutan adat mereka dipertahankan agar tidak diambil alih oleh negara atau perusahaan untuk diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Mereka juga tidak diintimidasi untuk menjual seluruh lahan mereka sekaligus tetapi diberi pilihan untuk menanam kelapa sawit mereka sendiri atau menjual lahan sedikit demi sedikit (Dewi, 2013). Perusahaan juga memberikan kesempatan bagi warga lokal untuk menyediakan jasa transportasi dari perkebunan ke pabrik. Hasilnya, warga lokal bisa menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh industri kelapa sawit sembari tetap mempertahankan hutan adat sebagai pelestarian budaya dan mata pencarian alternatif selain perkebunan sawit.

Kesimpulan

Kerangka rantai nilai global dipilih karena menawarkan jalan tengah untuk tidak terjebak terlalu dalam diskursus paradigma pembangunan yang memiliki kecenderungan liberal atau sosialis. Rantai nilai global juga mampu menggambarkan kompleksitas sistem perekonomian dunia pada masa kini. Menurut laporan UNCTAD sejak tahun 2013, 80% perdagangan dunia terjadi dalam kerangka rantai nilai global (UNCTAD, 2013). Hal ini menunjukkan sistem ekonomi yang semakin terintergrasi dan saling terkait. Dengan alasan ini pula, diskursus mengenai paradigma pembangunan yang memiliki kecenderungan liberal atau sosialis menjadi tidak terlalu relevan. Oleh karena itu, analisis relasi kuasa antar setiap aktor dalam suatu rantai nilai global penting untuk melihat distribusi keuntungan yang seharusnya mengarah pada pemerataan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan setiap pihak seringkali berseberangan. Aspek pertumbuhan berbasis data-data ekonometrika seperti angka pengentasan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia masih menjadi tolok ukur utama pembangunan pada aspek sosial. Di sisi lain, tekanan dari berbagai pihak khususnya organisasi non pemerintah dan Uni Eropa menyebabkan isu lingkungan menjadi fokus industri kelapa sawit Indonesia beberapa bulan terakhir. Sengketa yang masih bergulir ini sepertinya belum akan selesai dalam waktu dekat karena akan terus bereksklalasi hingga ke persidangan di World Trade Organization (WTO).

Budaya diharapkan menjadi elemen baru dan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia. Beberapa dokumen penting terkait peran budaya dalam pembangunan telah dirumuskan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Kajian tentang peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak tata kelola budaya di daerah juga telah menunjukkan bahwa kebijakan strategis dan transformatif perlu diambil pemerintah. Mengurai kompleksitas industri kelapa sawit dapat dimulai dengan kehendak politis yang kuat.

Daftar Pustaka

- Dewi, O. (2013). Reconciling Development, Conservation, and Social Justice in West Kalimantan. In *The Palm Oil Controversy in Southeast Asia: A Transnational Perspective* (1st ed.). ISEAS Publishing. Singapore.
- Du Plessis, A., & Rautenbach, C. (2010). Legal perspectives on the role of culture in sustainable development. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 13(1). <https://doi.org/10.4314/pej.v13i1.55352>
- European Commission. (2018) Sustainability criteria. Energy. https://wayback.archive-it.org/12090/20220405002735/https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria_en
- Gereffi, G. (2013). Global value chains in a post-Washington Consensus world. *Review of International Political Economy*, 21(1), 9–37. <https://doi.org/10.1080/09692290.2012.756414>
- Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2016). *Global Value Chain Analysis: A Primer*, 2nd Edition. Global Value Chain Analysis: A Primer, 2nd Edition. <https://hdl.handle.net/10161/12488>
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Gillespie, P. (2016). Participation, Power: The Upstream Complexity of Indonesian Palm Oil Plantation. In *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (1st ed.). NUS Press. Singapore.
- International Trade Centre. (2021). List of exporters for the selected product in 2021 Product: 1511 Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding chemically modified). Retrieved March 1, 2023, from https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c1511%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1%7c1
- Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), G. P. (2016). *Sekilas Perjalanan Sawit di Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)*. <https://gapki.id/news/1283/sekilas-perjalanan-sawit-di-indonesia>
- Kementerian Perindustrian. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)*. [https://kemenperin.go.id/ripin#:~:text=Rencana%20Induk%20Pembangunan%20Industri%20Nasional%20\(RIPIN\)%202015%2D2035%20ditetapkan,dalam%20perencanaan%20dan%20pembangunan%20industri](https://kemenperin.go.id/ripin#:~:text=Rencana%20Induk%20Pembangunan%20Industri%20Nasional%20(RIPIN)%202015%2D2035%20ditetapkan,dalam%20perencanaan%20dan%20pembangunan%20industri).

- Levang, Riva, & Orth . (2016). Oil Plantations and Conflict in Indonesia: Evidence from West Kalimantan. In *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia* (1st ed.). NUS Press. Singapore.
- Nesadurai, H. E. S. (2017). New Constellations of Social Power: States and Transnational Private Governance of Palm Oil Sustainability in Southeast Asia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(2), 204–229. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1390145>
- Pacheco P., Gnych S., Dermawan A., Komarudin H., & Okarda B. (2017). The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006405>
- Schleifer, P., & Sun, Y. (2018). Emerging markets and private governance: the political economy of sustainable palm oil in China and India. *Review of International Political Economy*, 25(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1418759>
- The Japan Times. (2019). World awash in sustainable palm oil, but consumers unwilling to pay premium for environmentally friendly supply. *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/14/world/world-awash-sustainable-palm-oil-consumers-unwilling-pay-premium-environmentally-friendly-supply/>
- Tijaja, & Faisal. (2014). Industrial Policy in Indonesia: A Global Value Chain Perspective. In *The Asian Development Bank (ADB)*. Retrieved March 1, 2023, from <https://www.adb.org/publications/industrial-policy-indonesia-global-value-chain-perspective>
- Tong, Y. S. (2017). Vertical specialisation or linkage development for agro-commodity value chain upgrading? The case of Malaysian palm oil. *Land Use Policy*, 68, 585–596. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.020>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2013). *Global Value Chains and Development*. Diakses pada 1 Maret, 2023, dari https://unctad.org/system/files/official-document/diae2013d1_en.pdf
- Varkkey, H. (2015). *The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage*. Routledge.
- Vasstrøm, M., & Normann, R. (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. *Local Government Studies*, 45(6), 848–868. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1590200>
- Wiktor-Mach, D. (2018). What role for culture in the age of sustainable development? UNESCO's advocacy in the 2030 Agenda negotiations. *International Journal of Cultural Policy*, 26(3), 312–327. <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1534841>